

TAJUK RENCANA

Berantas Pungli dengan Sapu Bersih

LANGKAH Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungli (Satgas Saber Pungli) patut diapresiasi. Meski sebagian kalangan menganggap Perpres tersebut berlebihan, kita menganggapnya tetap perlu dan penting. Perpres Saber Pungli sekaligus menunjukkan komitmen serius Presiden Jokowi untuk memberantas pungli di semua sektor.

efektivitas kerja Satgas. Sekadar mengingatkan, semasa pemerintahan Soeharto pernah digencarkan operasi pemberantasan pungli yang dikenal dengan istilah Opstib atau Operasi Tertib yang fokusnya memberantas pungli. Namun, operasi yang dikomandani Pangkoptib Sudomo saat itu, hanya efektif sesaat, bukan untuk jangka panjang. Opstib yang dibentuk melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib itu hanya memberi efek jera sesaat. Selanjutnya, sejarah mencatat, pungli makin merebak di mana-mana tanpa bisa dicegah.

Pilkada dan Jalan Pintas Parpol

PERILAKU *nerabas* alias jalan pintas merupakan salah satu budaya yang saat ini sedang menjangkiti banyak aktor politik di negeri ini. Perilaku tersebut semakin tampak jelas jelang pemilihan kepala daerah (pilkada). Untuk Pilkada 2017 tampaknya saat ini sudah memasuki fase penyerahan berkas perbaikan paslon. Dan saat ini ada sekitar 328 paslon dari 101 daerah yang akan mengikuti kontestasi pilkada serentak.

Ahmad Anfasul Marom

yang kehilangan ruh ideologinya sehingga tidak ada pembeda antara partai satu dengan yang lain. Akibatnya banyak aktor politik yang memanfaatkan situasi ini dengan mengambil jalan pintas untuk memperoleh kekuasaan. Sementara partai politik sendiri cenderung pragmatis selagi calon yang diusungnya bisa menang.

Lembaga Survei Catatan tersebut mengkonfirmasi lembaga-lembaga survei yang selalu menempatkan parpol di urutan paling akhir dibanding lembaga publik lainnya dalam mengukur tingkat kepuasan publik seperti institusi kepolisian, KPK, pengadilan dan lainnya. Dari tahun ke tahun salama saja sama peringkatnya seolah-olah parpol enggan belajar dari pengalaman sebelumnya.

Proses Rekrutmen Dengan persentase tersebut seharusnya calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan parpol bisa mencapai sekitar 350-400 paslon. Kalau tidak berarti ada 'PR' serius dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan pelembagaan partai politik. Apalagi tidak sedikit paslon yang *nerabas* mengambil jalan pintas untuk memenangkan pilkada meskipun mereka tidak pernah dibesarkan dalam kader partai pengusungnya. Kandidat *short cut* semacam itu biasanya lahir dari kalangan artis ternama, pengusaha, *public figure*, pejabat atau mantan pejabat. Sebut saja Ahmad Dhani, Ahok, Agus Harimurti, Anis Baswedan dan yang lain.



Ada beberapa permasalahan yang dapat kita angkat di sini. *Pertama*, partai belum memiliki prosedur rekrutmen yang mapan baik dari sisi konsep maupun implementasinya. Sehingga banyak kader instan yang terjun di panggung politik tanpa memahami *platform* partainya. *Kedua*, partai masih mengandalkan model rekrutmen konvensional yakni mengandalkan basis dukungan lama. *Ketiga*, proses seleksi kandidat kepala daerah atau caleg seringkali mengesampingkan pertimbangan terhadap kapasitas, integritas, pengalaman dan penguasaan yang dimiliki bakal calon (Lili Romly, 2008).

Karenanya perlu upaya ekstra untuk mendorong pembaharuan partai politik di Indonesia. Setidaknya ada dua hal yang harus menjadi fokus reformasi parpol ini yaitu metode yang digunakan dan substansi yang dipasarkan. Dari segi metode partai harus mampu mendayagunakan sarana prasarana yang ada. Sedangkan dari sisi substansi partai harus memiliki kepekaan dan kemampuan dalam merespons berbagai isu yang terjadi.

Terakhir, perlu penulis tekankan bahwa bagaimanapun partai merupakan salah satu instrumen pokok yang absah dalam mengisi jabatan-jabatan publik. Pilkada serentak 2017 yang akan berlangsung di 7 provinsi, 18 kota dan 76 kabupaten di seluruh Indonesia bisa menjadi arena kontestasi yang produktif bagi partai politik dalam mengobati kekecewaan publik. Dan apabila kekecewaan publik terhadap partai ini tidak segera diatasi, bukan tidak mungkin proses konsolidasi demokrasi yang sampai saat ini masih terus-menerus kita bangun akan 'mangkrak'. Bahkan terhenti kalau tidak terdorong mundur. □ - c

\* Ahmad Anfasul Marom MA, Dosen Ilmu Politik UIN Sunan Kalijaga, Komisioner KPU DIY.

Maksimum 600 Kata PARA pengirim naskah Opini KR harap membatasi panjang naskah maksimum 4.000 karakter atau setara sekitar 600 kata. Seratkan riwayat hidup singkat dan nomor telepon. Naskah harap dikirim ke alamat email opinikr@gmail.com

Pikiran Pembaca Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Reuni Akbar FKH-P UGM REUNI Akbar Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKH-P) UGM akan diselenggarakan Minggu, 6 November 2016 bertempat di Wisma Kagama UGM, pukul 10.00 WIB sampai selesai. Acara silaturahmi dan kangen-kangenan mengenang masa-masa kuliah di FKH-P UGM. Untuk itu kepada seluruh alumni FKH-P UGM angkatan 1949-1974

SMKN 3 Juara Umum Porgukar PEKAN Olahraga Guru dan Karyawan (Porgukar) merupakan ajang lomba olahraga khusus bagi guru dan karyawan. Setiap tahun kegiatan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogya bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Yogya bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi dan membangun semangat sportivitas para guru dan karyawan. Tahun 2016 ini, Porgukar diselenggarakan 22-23 Oktober 2016 bertempat di lapangan SMKN 2 dan SMKN 3 Yogya. Jenis olahraga yang dilombakan antara lain badminton, tenis meja, catur, voli dan Kasti dengan peserta guru dan karyawan dari tingkat SMP dan SMA/SMK se-Kota Yogya. Layaiknya atlet pada umumnya, semangat dan kemampuan para guru

Pungli dan Kita

GEBRAKAN baru Presiden Joko Widodo. Saat menyerahkan sertifikat tanah di Solo beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi menyatakan bertekad memberantas pungli (pungutan liar). Pungli sekecil apa pun akan saya berantas, tegas Mantan Walikota Solo itu.

Benni Setiawan

yang diberikan. Oleh karena itu, pungli akan dapat hilang saat masyarakat melakukan lompatan besar. Artinya, alam pikir masyarakat perlu mendapat hentakan bahwa pungli adalah salah. Pungli hanya akan menyuburkan ruang 'kemalasan' birokrasi. Aparatur akan memanfaatkan celah ini untuk mendapatkan uang tambahan. Aparatur pun menganggap itu adalah uang halal, karena masyarakat secara suka rela memberikan.

melebihi jumlah total kesadaran individual. Karena pikiran, perasaan, dan perilaku masyarakat berbeda dan berlainan dari pikiran, perasaan, dan perilaku individu-individu. Fakta sosial harus diterangkan dengan fakta sosial lain, bukan dengan fakta psikologis atau hukum alam (KJ Veeger, 1985).

Kemalasan Birokrasi Membenarkan keburukan memang telah menjadi bagian dari tradisi bangsa. Karena keburukan dilakukan secara berulang dan simultan, maka ia kemudian menjadi sebuah 'kebenaran'. Sebaliknya, kebenaran yang jarang dilakukan, bahkan seringkali diolok-olok, maka ia akan menjadi sebuah 'keburukan'. Demikian pula dengan pungli. Ia akan karena masyarakat membenarkan praktik ini. Mereka menganggap wajar jika seseorang yang telah membantunya mendapat imbalan. Bahkan, masyarakat menganggap imbalan itu tidak ada artinya jika ia harus kehilangan waktu untuk antre, menunggu proses, dan dokumen yang tak kunjung rampung karena sistem.

Pungli yang telah membudaya merupakan fakta sosial yang perlu dilawan dengan fakta sosial baru bahwa ia menjadikan bangsa ini tidak berdaya. Pungli menjadikan birokrasi malas dan mengajarkan masyarakat budaya instan dan pragmatis. Pada akhirnya, memberantas pungli perlu dipahami dalam 'pertarungan' ide. Pasalnya, pungli telah lama ada di Nusantara dan telah dianggap biasa dan wajar. Dekonstruksi pemikiran dan menjejer fakta sosial terkait kelumpuhan bangsa akibat pungli perlu menjadi agenda pemerintah. Pemantik itu telah disulut oleh Presiden Jokowi. Tinggal kita berani dan siap berubah atau tidak. □ - c

\* Benni Setiawan, Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan P-MKU Universitas Negeri Yogyakarta, Peneliti Maarif Institute.

Aksi Sosial Muda-Mudi Kuroboyo SUMPAH Pemuda menjadi bagian sejarah Indonesia yang menandakan semangat para pemuda untuk menyatakan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa persatuan. Dari semangat tersebut Keluarga Muda-Mudi (KMK) Kuroboyo dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda dan Ulang Tahun KMK akan menggelar aksi sosial berupa donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis, Minggu, 30 Oktober 2016, pukul 09.00-12.00 WIB di lapangan voli Kuroboyo, Caturharjo, Pandak, Bantul. Penyelenggara mengajak seluruh masyarakat sekitar, khususnya para pemuda untuk berpartisipasi dalam

Kedaulatan Rakyat SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS: ISSN: 0852-6496. Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta. Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Drs HM Romli. Direktur Utama: dr Gun Nugroho Samawi. Direktur Pemusahan: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS. Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA, Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada. Manajer Litbang Diklat Redaksi: Wisnoko Poernomo, Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Sihono HT, H Soeparno S Adhy, Drs Widyo Suprayogi, Dra Esti Susilarti MPd, Yon Haryono Hadi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Sulistyoto Supoto, Drs Hasto Sutadi, Eko Boediarto, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H Chaidir, M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Wahyu Priyanti SH, Ardihi Wardani SPd, Fotografer: Eddy Wijono Patro, Franz Boedi Sukarnanto, Surya Adi Lesmana, Bambang Nurcahya. Grafis: Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyanti. Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklankr@kr.co.id, iklankr@yaho.com, iklankr@icloud.com. Langanan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Clik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 km x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 km x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman 1: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10% Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 565685 (Hunting) Alamat Persebaran: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573. Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krgogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Reki: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta. Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Taha Rahrja. Semarang: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaidi Raqi, Syaifulah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Alfons Suhadi, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Surabaya: Jalan Lamperanti No.62, Semarang, Telp (024) 8915739, 8448822. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SH, Wakil Kepala Biro: Sukaryono BA. Surokarto: Jalan Bhayangkara No.13, Surokarto 57141. Telp/Fax (0271) 718015. Kepala Perwakilan: Dra Hermin Lestari, Kepala Biro: Qomarul Hadi. Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No 2-3, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Kepala Biro: Edhi Romadhon. Blaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klatan, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Kepala Biro: Sri Waristi. Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Suniarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. Purworejo: Jalan Veteran Blok A Kav. 6, Purworejo Plaza, Telp/Fax (0275) 321848. Kepala Perwakilan: Supranto SPd, Kepala Biro: Gunarwan. Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suyatno, Kepala Biro: R Agusutata. Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Subardi, Kepala Biro: Y Agus Waluyo.